



BDK SURABAYA



LAPORAN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

TRIWULAN I TAHUN 2025

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Indeks Persepsi Anti Korupsi

Balai Diklat Keagamaan Surabaya

Disahkan Tanggal: 27 Maret 2025



Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya

Dr. H. Iapar, M. Pd
NIP 196812311994031026

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, dan atas karunia, hidayah serta inayah-Nya, Laporan Hasil **Survei Persepsi Anti Korupsi Balai Diklat Keagamaan Surabaya** dapat terselesaikan. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran persepsi peserta pelatihan terkait korupsi selama berlangsungnya kegiatan pelatihan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam perbaikan kualitas kinerja di Balai Diklat Keagamaan Surabaya.

Panitia **Survei Persepsi Anti Korupsi Balai Diklat Keagamaan Surabaya** mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sejak pelaksanaan survei hingga penyusunan laporan ini. Segala saran dan masukan sangat diperlukan karena kami menyadari adanya kekurang-sempurnaan dalam laporan ini. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya Hasil **Survei Persepsi Anti Korupsi Balai Diklat Keagamaan Surabaya**.

Surabaya, Maret 2025

Tim Pelaksana

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1. LATAR BELAKANG	6
1.2. MAKSDUD DAN TUJUAN	7
1.3. RUANG LINGKUP DAN BATASAN	7
1.4. HASIL YANG INGIN DICAPAI	7
BAB II METODE PENGUKURAN	8
2.1. POPULASI DAN SAMPEL	8
2.2. WAKTU DAN TEMPAT	8
2.3. RESPONDEN	8
2.4. KUESIONER	8
2.5. NILAI PERSEPSI	9
BAB III HASIL PENGUKURAN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI	10
3.1. PROFIL RESPONDEN	10
3.2. HASIL PERHITUNGAN IPAK	13
3.3. REKAPITULASI NILAI	21
BAB IV PENUTUP	23
4.1. KESIMPULAN	23
4.2. REKOMENDASI	23
LAMPIRAN	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Karakteristik Gender Responden.....	11
Gambar 3.2.	Karakteristik Kelompok Umur Responden.....	12
Gambar 3.3.	Karakteristik Pendidikan Terakhir Responden	12
Gambar 3.4.	Karakteristik Pangkat/Golongan Responden	13
Gambar 3.5.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Manipulasi Peraturan.....	14
Gambar 3.6.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Penyalahgunaan Jabatan	15
Gambar 3.7.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Menjual Pengaruh.....	15
Gambar 3.8.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Hadiyah.....	16
Gambar 3.9.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Biaya	17
Gambar 3.10.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Pencaloan	18
Gambar 3.11.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Perbuatan Curang	18
Gambar 3.12.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transaksi Rahasia	19
Gambar 3.13.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Aduan	20
Gambar 3.14.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Respon Terhadap Aduan.....	20
Gambar 3.15.	Indeks Persepsi Anti Korupsi Per Unsur Penilaian	22

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Nilai Persepsi	9
Tabel 3.1.	Pelatihan oleh BDK Surabaya Maret 2024	10
Tabel 3.2.	Tingkat Partisipasi Survei	11
Tabel 3.3.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Manipulasi Peraturan.....	14
Tabel 3.4.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Penyalahgunaan Jabatan.....	14
Tabel 3.5.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Menjual Pengaruh.....	15
Tabel 3.6.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Hadiah	16
Tabel 3.7.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Biaya	17
Tabel 3.8.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Pencaloan.....	17
Tabel 3.9.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Perbuatan Curang	18
Tabel 3.10.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transaksi Rahasia.....	19
Tabel 3.11.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Aduan	19
Tabel 3.12.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Respon Terhadap Aduan.....	20
Tabel 3.13.	Rekapitulasi Indeks Persepsi Anti Korupsi Balai Diklat Keagamaan Surabaya	21
Tabel 3.14.	Indeks Persepsi Anti Korupsi per Rumpun Pelatihan.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Balai Diklat Keagamaan Surabaya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut adalah tersusunnya indeks persepsi anti korupsi yang sekaligus menjadi parameter Pemerintah yang Bersih dan Melayani.

Balai Diklat Keagamaan Surabaya merupakan lembaga pemerintah yang menjadi UPT Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan diklat di wilayah kerja Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. 59 tahun 2015, tugas Balai Diklat Keagamaan adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) tenaga administrasi serta tenaga teknis pendidikan dan keagamaan. Diklat yang diselenggarakan terdiri dari diklat sebelum pegawai menduduki jabatan (pelatihan dasar/latsar), diklat dalam jabatan dan diklat kepemimpinan. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Diklat Keagamaan Surabaya senantiasa terkait dengan aktivitas pelayanan kepada peserta diklat. Diharapkan pelayanan yang diberikan adalah pelayanan publik yang bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme.

Demi terwujudnya pelayanan pelatihan yang bebas dari korupsi, dilakukan penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Persepsi yang baik dari peserta diklat akan ditunjukkan dari tingginya perolehan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dari Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Sedangkan IPAK yang rendah menunjukkan kurang pedulinya lembaga terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Perolehan IPAK tersebut selanjutnya bisa dijadikan dasar dalam penerapan kebijakan terkait pelayanan yang bebas dari korupsi.

1.2. MAKSD DAN TUJUAN

Secara umum maksud dan tujuan dilaksanakannya Survei Persepsi Anti Korupsi adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai Persepsi Anti Korupsi dari pengguna layanan pelatihan di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Di samping itu, juga bertujuan untuk mendapatkan referensi yang valid dalam menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas layanan secara kontinyu serta mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi diharapkan dapat menjadi rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. RUANG LINGKUP DAN BATASAN

Pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi di Balai Diklat Keagamaan Surabaya dilakukan dalam kurun waktu Triwulan pertama Tahun 2025 dengan melibatkan peserta yang mengikuti pelatihan selama kurun waktu tersebut.

1.4. HASIL YANG INGIN DICAPAI

Hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi mengenai Persepsi Anti Korupsi dari pengguna layanan diklat di Balai Diklat Keagamaan Surabaya.

BAB II

METODE PENGUKURAN

2.1. POPULASI DAN SAMPEL

Dalam kegiatan ini, yang menjadi populasi adalah seluruh peserta Pelatihan BDK Surabaya baik itu dalam pola klasikal maupun campuran, yang diselenggarakan selama Triwulan pertama tahun 2025. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam kegiatan ini adalah *voluntary response sampling* yaitu penentuan sampel yang terdiri dari *self-chosen respondent*. Dalam arti lain, para responden secara sukarela mengambil bagian dalam studi penelitian untuk berbagi pendapat mereka tentang topik yang sedang dibahas. Teknik ini dipilih atas pertimbangan kemudahan dan efisiensi waktu. Data yang dikumpulkan adalah data primer dengan metode pengumpulan data berupa survei secara *online* via *google form* dengan jenis data kuantitatif dan kualitatif.

2.2. WAKTU DAN TEMPAT

Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan I oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya dilaksanakan dalam kurun waktu satu bulan pada Maret 2025. Hal ini dilakukan dengan alasan hanya pada bulan Maret BDK Surabaya memberikan layanan pelatihan. Survei dilaksanakan secara *online* di tempat pelatihan masing-masing. Responden menjawab pertanyaan yang diajukan melalui *google form*. Kuesioner survei dapat diakses melalui tautan berikut:

<https://bit.ly/persepsikorupsi2025>

2.3. RESPONDEN

Kriteria untuk responden Survei Persepsi Anti Korupsi adalah peserta Pelatihan yang diadakan oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya selama Maret 2025. Untuk menghindari bias, responden yang dipilih ialah mereka yang sedang melakukan atau yang telah melakukan pelatihan dalam waktu referensi survei berlangsung.

2.4. KUESIONER

Kuesioner dipilih sebagai alat bantu pengumpulan data guna menyusun Indeks Persepsi Anti Korupsi. Unsur yang dipakai untuk mengukur persepsi peserta pelatihan dalam survei ini sebanyak sepuluh unsur yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan dengan 4 pilihan jawaban berskala

ordinal, yaitu “selalu”, “sering”, “jarang”, “tidak ada” dengan skor untuk masing-masing jawaban dari angka 1,2,3, dan 4. Kesepuluh unsur tersebut terdiri dari:

- 1) Manipulasi peraturan;
- 2) Penyalahgunaan jabatan;
- 3) Menjual pengaruh;
- 4) Hadiah;
- 5) Transparansi Biaya;
- 6) Pencaloan;
- 7) Perbuatan curang;
- 8) Transaksi rahasia;
- 9) Transparansi Aduan
- 10) Respon terhadap pengaduan.

2.5. NILAI PERSEPSI

Penilaian persepsi sangat penting dalam mengukur hasil pelaksanaan survei Persepsi Anti Korupsi. Dalam membaca interval hingga penilaian kinerja pelayanan, tabel nilai persepsi dapat memandu masyarakat dalam menyimpulkan kinerja pelayanan suatu institusi. Sehingga baik institusi maupun masyarakat nantinya dapat memberikan sumbangsih saran, pendapat hingga kritikan yang membangun. Berikut adalah nilai persepsi, nilai interval, nilai konversi, mutu, dan kinerja pelayanan.

Tabel 2.1. Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Layanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

HASIL PENGUKURAN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. PROFIL RESPONDEN

Sepanjang Triwulan I Tahun 2025, BDK Surabaya telah melaksanakan 12 Pelatihan. Pelatihan-pelatihan ini dilaksanakan dalam pola campuran melalui Pelatihan di Wilayah Kerja. Berikut ditabulasikan pelatihan yang diselenggarakan selama Bulan Maret 2025 beserta jenis dan pola pelatihannya.

Tabel 3.1. Pelatihan oleh BDK Surabaya Maret 2024

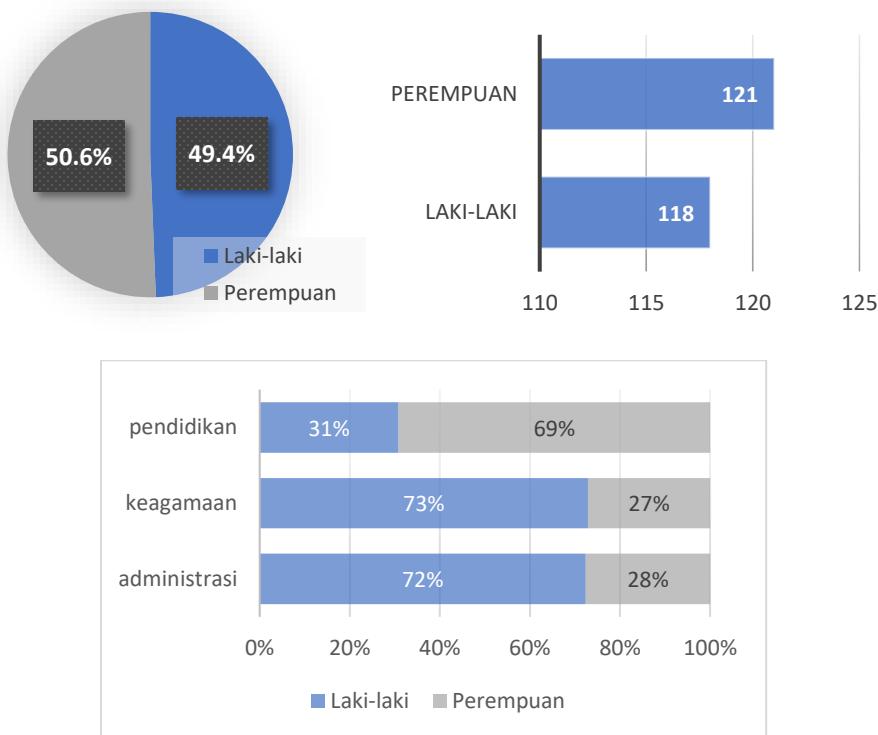
No	Nama Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Pelatihan	Pola Pelatihan
1	Pelatihan Penggerak Penguatan Moderasi Beragama Kab. Kediri	4 – 14 Maret 2025	Pelatihan Administrasi	PDWK Campuran
2	Pelatihan Penggerak Penguatan Moderasi Beragama Kab. Nganjuk	4 – 14 Maret 2025	Pelatihan Administrasi	PDWK Campuran
3	Pelatihan Manajemen Kemasjidan Kab. Magetan	4 – 14 Maret 2025	Pelatihan Teknis Keagamaan	PDWK Campuran
4	Pelatihan IKM Pembelajaran Berdiferensiasi Kab. Jombang	4 – 14 Maret 2025	Pelatihan Teknis Pendidikan	PDWK Campuran
5	Pelatihan IKM Literasi MI Kab. Mojokerto	4 – 14 Maret 2025	Pelatihan Teknis Pendidikan	PDWK Campuran
6	Pelatihan IKM Literasi MI Kab. Pasuruan	4 – 14 Maret 2025	Pelatihan Teknis Pendidikan	PDWK Campuran
7	Pelatihan Penggerak Penguatan Moderasi Beragama Kab. Madiun	10 – 21 Maret 2025	Pelatihan Administrasi	PDWK Campuran
8	Pelatihan Penggerak Penguatan Moderasi Beragama Kab. Malang	10 – 21 Maret 2025	Pelatihan Administrasi	PDWK Campuran
9	Pelatihan Penggerak Penguatan Moderasi Beragama Kab. Ponorogo	10 – 21 Maret 2025	Pelatihan Teknis Pendidikan	PDWK Campuran
10	Pelatihan Kerukunan Umat Beragama Kab. Ngawi	10 – 21 Maret 2025	Pelatihan Teknis Keagamaan	PDWK Campuran
11	Pelatihan IKM Raudlatul Athfal Kab. Sidoarjo	10 – 21 Maret 2025	Pelatihan Teknis Pendidikan	PDWK Campuran
12	Pelatihan IKM Pembelajaran Berdiferensiasi Kab. Gresik	10 – 21 Maret 2025	Pelatihan Teknis Pendidikan	PDWK Campuran

Selama periode survei, sebanyak **239 responden** telah berpartisipasi dalam Survei Persepsi Anti Korupsi yang diadakan oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Dalam triwulan pertama Tahun 2025, tingkat partisipasi survei untuk peserta Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan adalah sebanyak **133 responden**. Tingkat partisipasi survei untuk Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan sebanyak **48 responden** sedangkan tingkat partisipasi survei untuk peserta Pelatihan Tenaga Administrasi adalah sebanyak **58 responden**. Responden tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa kategori responden untuk diketahui karakteristiknya.

Tabel 3.2. Tingkat Partisipasi Survei

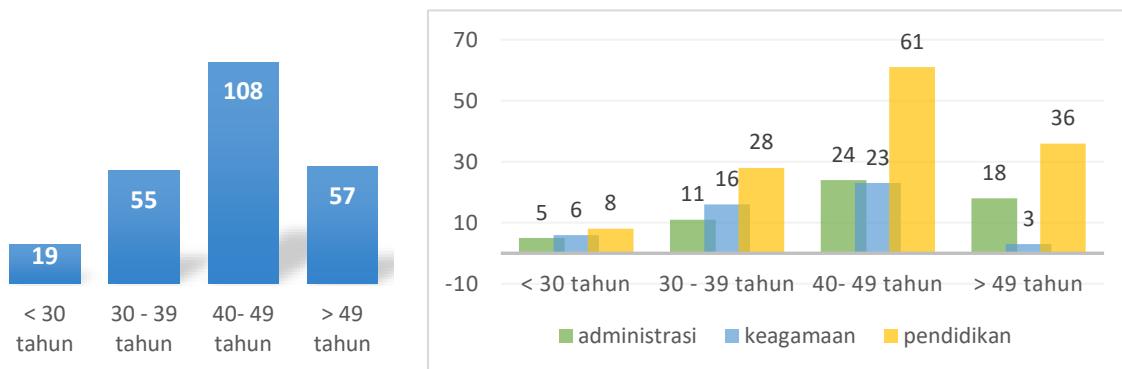
Jenis Pelatihan	Jumlah Responden Terlibat
Pelatihan Teknis Pendidikan	133
Pelatihan Teknis Keagamaan	48
Pelatihan Administrasi	58

Partisipasi peserta dalam pelatihan yang diadakan oleh BDK Surabaya selama Triwulan I tahun 2025 tampak cenderung seimbang antara peserta laki-laki dan perempuan. Sekitar 50,6% peserta merupakan perempuan, berselisih tipis dengan peserta laki-laki yang proporsinya sekitar 49,4%. Dari gambar 3.1 ditunjukkan bahwa dari total 239 responden, sebanyak 121 orang adalah perempuan sedangkan sisanya adalah laki-laki.



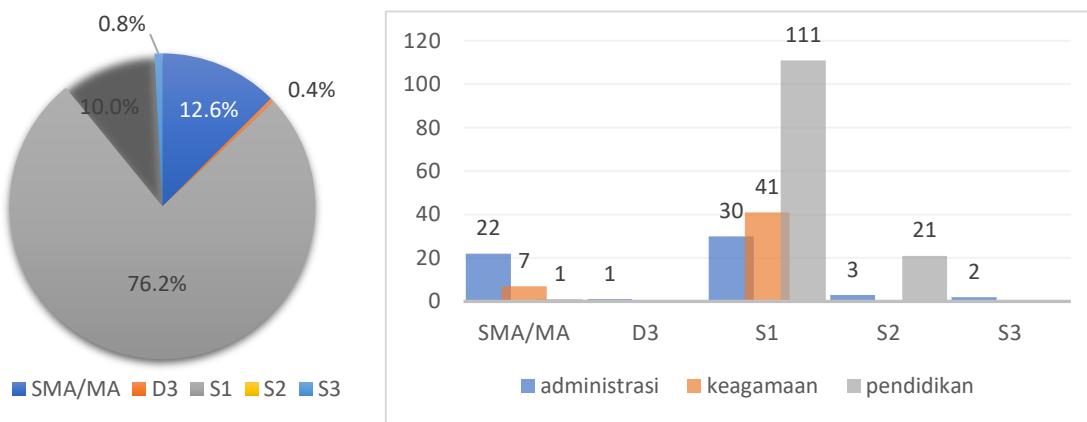
Gambar 3.1. Karakteristik Gender Responden

Namun jika diperhatikan per rumpun pelatihan, tampak variasi dalam karakteristik gender responden. Peserta Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan didominasi oleh perempuan yakni sebanyak 69 persen dari 133 responden. Sebaliknya, laki-laki lebih mendominasi Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan yaitu 73 persen dari 48 responden. Senada dengan Pelatihan Tenaga Administrasi yang cenderung didominasi peserta laki-laki yakni 72 persen berbanding 28 persen peserta perempuan.



Gambar 3.2. Karakteristik Kelompok Umur Responden

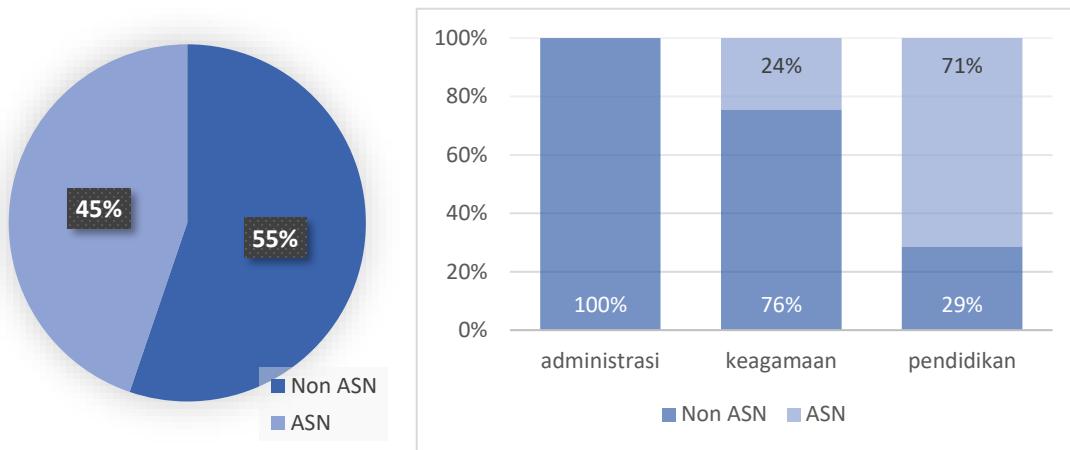
Secara umum, responden didominasi oleh peserta pelatihan dalam kelompok umur 40-49 tahun. Disusul oleh kelompok peserta dalam rentang usia di atas 49 tahun, dan kelompok usia 30-39 tahun. Dalam survei kali ini, tampak karakteristik yang sama di setiap rumpun pelatihan. Kelompok usia 40-49 tahun tampak mendominasi baik pelatihan tenaga teknis pendidikan, teknis keagamaan, dan pelatihan administrasi.



Gambar 3.3. Karakteristik Pendidikan Terakhir Responden

Dari keseluruhan peserta pelatihan BDK Surabaya selama triwulan pertama tahun 2025, sebanyak 76,2 persen dari populasi merupakan tamatan sarjana, disusul oleh tamatan SMA/MA sebanyak 12,6 persen, dan sebanyak 10 persen merupakan para magister. Sisanya masing-masing merupakan peserta dengan pendidikan terakhir S3 (0,8 persen) dan Diploma (0,4 persen).

Sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati, pada tahun 2025 beberapa pelatihan yang diselenggarakan BDK Surabaya lebih banyak menyalurkan tokoh masyarakat dan SDM Agama Non ASN. Terutama untuk Pelatihan Penggerak Penguatan Moderasi Beragama dan Pelatihan Kerukunan Umat Beragama.



Gambar 3.4. Karakteristik Pangkat/Golongan Responden

Pada triwulan I tahun 2025, sebanyak 55% peserta merupakan Non ASN dan sisanya adalah ASN. Peserta Non ASN lebih banyak tersebar di rumpun Pelatihan Tenaga Administrasi. Seluruh peserta Pelatihan Tenaga Administrasi merupakan Non ASN, sesuai dengan peruntukannya. Senada dengan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan yang kepesertaannya lebih didominasi oleh Non ASN yakni sebanyak 76%. Di sisi lain, peserta ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK lebih banyak mengikuti Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan yaitu dengan proporsi 71% dari seluruh populasi dalam rumpun pelatihan tersebut.

3.2. HASIL PERHITUNGAN IPAK

Seperi yang telah disebutkan sebelumnya bahwa terdapat sepuluh unsur yang dinilai dalam survei Persepsi Anti Korupsi. Berikut ini akan diuraikan hasil perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi untuk masing-masing unsur.

3.2.1. Penilaian Setiap Unsur

a. Manipulasi Peraturan

Dari total responden sebanyak 239 responden, 237 orang di antaranya setuju bahwa tidak ada manipulasi peraturan di BDK Surabaya. Sedangkan sisanya sebanyak 2 orang menyatakan jarang menemui peristiwa manipulasi peraturan di BDK Surabaya. Dari skala 1-4, persepsi publik terhadap indikator manipulasi peraturan mendapatkan indeks

sebesar **3,99**. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa BDK Surabaya **bersih dari manipulasi peraturan**.

Tabel 3.3. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Manipulasi Peraturan

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	0	0%
Sering	2	0	0%
Jarang	3	2	0,84%
Tidak Ada	4	237	99,16%
Jumlah		239	100%



Gambar 3.5. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Manipulasi Peraturan

b. Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1-4, persepsi mengenai penyalahgunaan jabatan berhasil mencapai indeks **3,99**. Indeks ini diperoleh berkat sebanyak 237 responden menyatakan bahwa tidak ada penyalahgunaan jabatan di lingkungan BDK Surabaya. Sisanya menyatakan jarang melihat ada penyalahgunaan jabatan, yakni sebanyak 0,84 persen. Dari perolehan indeks tersebut, BDK Surabaya dinyatakan **bersih dari penyalahgunaan jabatan**.

Tabel 3.4. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Penyalahgunaan Jabatan

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	0	0%
Sering	2	0	0%
Jarang	3	2	0,84%
Tidak Ada	4	237	99,16%
Jumlah		239	100%



Gambar 3.6. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Penyalahgunaan Jabatan

c. Menjual Pengaruh

Dari total 239 responden, 232 orang diantaranya menyatakan tidak pernah dihubungi oleh pegawai BDK Surabaya untuk membantu pengurusan berkas tertentu. Sebanyak 3 orang menyatakan jarang ada pegawai BDK Surabaya yang menjual pengaruh untuk tindakan korupsi, sedangkan sisanya menyatakan sering dan selalu ada pegawai BDK Surabaya yang menjual pengaruhnya. Dari pengumpulan data tersebut, didapatkan nilai persepsi sebesar **3,95** sehingga dapat disimpulkan bahwa BDK Surabaya **bersih dari tindakan menjual pengaruh**.

Tabel 3.5. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Menjual Pengaruh

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	2	0,84%
Sering	2	2	0,84%
Jarang	3	3	1,26%
Tidak Ada	4	232	97,07%
Jumlah		239	100%



Gambar 3.7. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Menjual Pengaruh

d. Hadiah

Persepsi untuk unsur ini diukur melalui pertanyaan, "Apakah Anda memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima, meskipun tidak diminta?" sebanyak 97,91 persen dari responden menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan tindakan tersebut, 1 orang atau sekitar 0,42 persen menyatakan se ring, dan sisanya sebanyak 4 orang atau sekitar 1,67 persen dari total responden menyatakan bahwa mereka selalu memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima meskipun tidak pernah diminta. Dari pengumpulan data ini, diperoleh indeks persepsi sebesar **3,94**. Angka ini dapat diartikan bahwa BDK Surabaya **bersih dari gratifikasi** atau penerimaan hadiah.

Tabel 3.6. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Hadiah

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	4	1,67%
Sering	2	1	0,42%
Jarang	3	0	0,00%
Tidak Ada	4	234	97,91%
Jumlah		239	100%



Gambar 3.8. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Hadiah

e. Transparansi Biaya

Biaya/tarif pelayanan yang dibebankan kepada peserta dalam rangka mengikuti Pelatihan di Wilayah Kerja (PDWK) adalah 0 (nol) rupiah atau gratis. Di samping sertifikat, peserta juga berhak mendapatkan honorarium sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Honorarium ini diserahkan setelah pelatihan berakhir dan dibuktikan melalui SPJ yang diserahkan kepada masing-masing peserta. Melalui SPJ inilah rincian honorarium peserta dapat dilihat. Dalam rangka mengukur persepsi publik mengenai transparansi biaya di BDK Surabaya, tim survei mengajukan pertanyaan berupa, "**Apakah BDK Surabaya tidak memberikan bukti transaksi keuangan setelah proses layanan pelatihan dilakukan?**"

Tabel 3.7. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Biaya

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	14	5,86%
Sering	2	3	1,26%
Jarang	3	5	2,09%
Tidak Ada	4	217	90,79%
Jumlah		239	100%



Gambar 3.9. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Biaya

Dari total 239 responden, sebanyak 217 orang diantaranya menyatakan bahwa tidak ada pelaksana kegiatan yang terlupa memberikan bukti transaksi. Sementara 5 orang menyatakan jarang, 3 orang menyatakan sering, dan ada 14 orang yang menyatakan bahwa pelaksana kegiatan selalu tidak memberikan bukti transaksi keuangan setelah proses pelayanan pelatihan. Berdasarkan data tersebut, didapatkan indeks persepsi publik sebesar **3,78**. Angka tersebut menunjukkan bahwa publik percaya bahwa BDK Surabaya **bersih dalam hal transparansi biaya**.

f. Pencaloan

Dari skala 1-4 unsur pencaloan memperoleh indeks persepsi sebesar 3,99. Hal ini berarti para responden menganggap bahwa layanan pelatihan yang diberikan oleh BDK Surabaya **bersih dari unsur pencaloan**.

Tabel 3.8. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Pencaloan

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	1	0,42%
Sering	2	1	0,42%
Jarang	3	1	0,42%
Tidak Ada	4	236	98,74%
Jumlah		239	100%



Gambar 3.10. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Pencaloan

Jika diuraikan per skor, sebanyak 236 orang atau 98,74 persen dari total responden mengatakan bahwa tidak ada praktik pencaloan di BDK Surabaya. Sebanyak masing-masing 1 orang (0,42 persen) mengatakan bahwa mereka jarang, sering, dan selalu mengetahui adanya praktik pencaloan di BDK Surabaya.

g. Perbuatan Curang

Dari total responden sebanyak 239 responden, 235 orang di antaranya menyatakan bahwa tidak ada praktik KKN di BDK Surabaya. Sisanya sebanyak 3 orang atau sekitar 1,26 persen menyatakan jarang melihat/mendengar adanya praktik KKN di BDK Surabaya dan 0,42 persen menyatakan selalu melihat praktik KKN di BDK Surabaya. Dari skala 1-4, persepsi publik terhadap unsur perbuatan curang adalah sebesar **3,97**. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa BDK Surabaya **bersih dari praktik KKN** (perbuatan curang).

Tabel 3.9. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Perbuatan Curang

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	1	0,42%
Sering	2	0	0,00%
Jarang	3	3	1,26%
Tidak Ada	4	235	98,33%
Jumlah		239	100%



Gambar 3.11. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Perbuatan Curang

h. Transaksi Rahasia

Pada triwulan pertama tahun 2025, unsur transaksi rahasia memperoleh indeks persepsi sebesar **3,98**. Terdapat 237 orang yang percaya bahwa tidak ada transaksi rahasia di BDK Surabaya, sisanya dengan proporsi kurang dari satu persen menganggap jarang dan selalu ada praktik transaksi rahasia. Berdasarkan perolehan tersebut, dapat dikatakan bahwa publik menganggap BDK Surabaya **bersih dari transaksi rahasia**.

Tabel 3.10. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transaksi Rahasia

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	1	0,42%
Sering	2	0	0,00%
Jarang	3	1	0,42%
Tidak Ada	4	237	99,16%
Jumlah		239	100%



Gambar 3.12. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transaksi Rahasia

i. Transparansi Aduan

Sebanyak 239 responden atau sekitar 94,98 persen dari total responden mengatakan bahwa BDK Surabaya terbuka terhadap pengaduan/laporan masyarakat terkait korupsi. Dari skala 1-4, indeks persepsi yang diperoleh untuk unsur transparansi aduan adalah sebesar **3,87**. Berdasarkan perolehan indeks persepsi ini, BDK Surabaya dapat dikatakan **bersih dalam hal transparansi aduan**.

Tabel 3.11. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Aduan

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	9	3,77%
Sering	2	1	0,42%
Jarang	3	2	0,84%
Tidak Ada	4	227	94,98%
Jumlah		239	100%



Gambar 3.13. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Aduan

j. Respon Terhadap Aduan

Selama survei berlangsung, responden disuguhkan pertanyaan berupa, "Apakah BDK Surabaya merespon lambat pengaduan/laporan masyarakat terkait korupsi?". Terdapat 229 responden atau sekitar 95,82 persen yang menyatakan tidak ada respon lambat terhadap aduan terkait korupsi. Sebanyak 6 orang, atau sekitar 2,51 persen dari total responden mengatakan bahwa respon lambat terhadap aduan jarang terjadi di BDK Surabaya. Sedangkan sekitar 1,67 persen sisanya mengatakan bahwa aduan/laporan terkait korupsi selalu direspon lambat oleh BDK Surabaya.

Tabel 3.12. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Respon Terhadap Aduan

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	4	1,67%
Sering	2	0	0,00%
Jarang	3	6	2,51%
Tidak Ada	4	229	95,82%
Jumlah		239	100%



Gambar 3.14. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Respon Terhadap Aduan

Dalam skala 1-4, persepsi publik terhadap unsur respon terhadap aduan mencapai indeks 3,92 yang berarti bahwa BDK Surabaya bersih dalam hal respon terhadap aduan.

3.3. REKAPITULASI NILAI

Dari uraian penilaian unsur di atas, selanjutnya dibuat perbandingan antar unsur. Berdasarkan tabel 3.13 tampak bahwa unsur manipulasi peraturan dan penyalahgunaan jabatan merupakan dua unsur yang mendapatkan nilai persepsi tertinggi. Masing-masing unsur tersebut memperoleh indeks persepsi rata-rata sebesar 3,99. Sedangkan unsur transparansi biaya merupakan unsur dengan nilai terendah daripada unsur yang lain. Tingkat persepsi masyarakat untuk unsur ini hanya mencapai 3,78. Meski begitu, kesepuluh unsur yang dinilai semuanya dinyatakan **bersih dari korupsi** berdasarkan persepsi publik.

Tabel 3.13. Rekapitulasi Indeks Persepsi Anti Korupsi Balai Diklat Keagamaan Surabaya

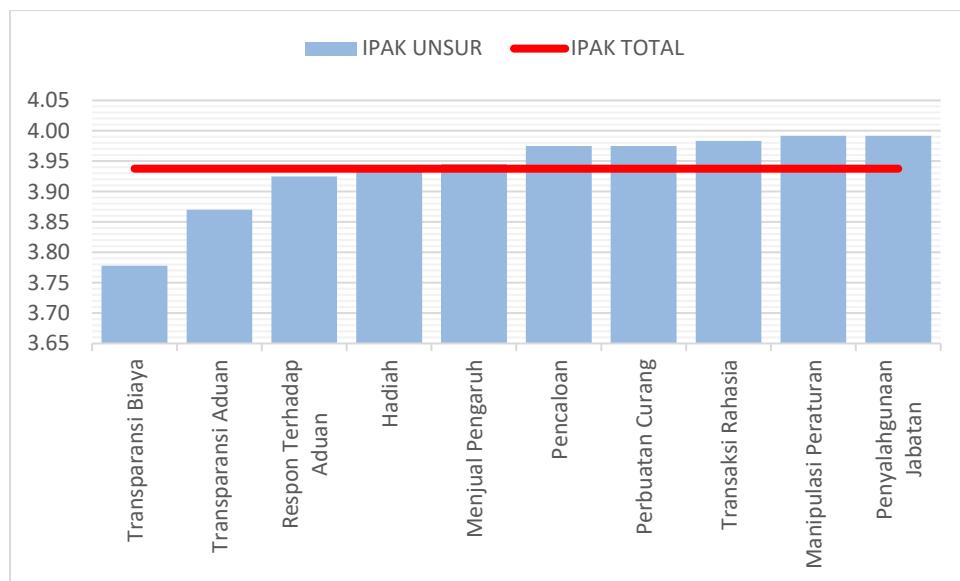
UNSUR PENILAIAN	NILAI PERSEPSI	KINERJA UNIT PELAYANAN
MANIPULASI PERATURAN	3,99	Bersih dari korupsi
PENYALAHGUNAAN JABATAN	3,99	Bersih dari korupsi
MENJUAL PENGARUH	3,95	Bersih dari korupsi
HADIAH	3,94	Bersih dari korupsi
TRANSPARANSI BIAYA	3,78	Bersih dari korupsi
PENCALOAN	3,97	Bersih dari korupsi
PERBUATAN CURANG	3,97	Bersih dari korupsi
TRANSAKSI RAHASIA	3,98	Bersih dari korupsi
TRANSPARANSI ADUAN	3,87	Bersih dari korupsi
RESPON TERHADAP ADUAN	3,92	Bersih dari korupsi
NILAI IPAK	3,94	Bersih dari korupsi

Ketiga rumpun pelatihan mendapatkan predikat "**bersih dari korupsi**" dengan perolehan IPAK yang bervariasi. Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan dengan perolehan IPAK tertinggi yakni sebesar 3,98. Selanjutnya Pelatihan Tenaga Administrasi yang memperoleh IPAK sebesar 3,95 serta Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dengan nilai IPAK sebesar 3,92. Indeks persepsi anti korupsi untuk masing-masing unsur dapat dilihat di tabel 3.14. Pada Pelatihan Tenaga Administrasi, unsur penyalahgunaan jabatan, dan pencaloan merupakan unsur dengan perolehan indeks persepsi anti korupsi tertinggi. Pada Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan, unsur pencaloan, adalah unsur dengan perolehan indeks persepsi anti korupsi paling tinggi. Sedangkan pada Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan, unsur manipulasi peraturan, pencaloan, dan transaksi rahasia adalah tiga unsur yang memperoleh indeks persepsi anti korupsi paling tinggi.

Tabel 3.14. Indeks Persepsi Anti Korupsi per Rumpun Pelatihan

UNSUR PENILAIAN	IPAK		
	PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI	PELATIHAN TENAGA TEKNIS PENDIDIKAN	PELATIHAN TENAGA TEKNIS KEAGAMAAN
Manipulasi Peraturan	3,98	3,99	4,00
Penyalahgunaan Jabatan	3,98	3,99	4,00
Menjual Pengaruh	3,98	3,92	3,98
Hadiah	3,96	3,93	3,94
Transparansi Biaya	3,88	3,68	3,92
Pencaloan	4,00	3,95	4,00
Perbuatan Curang	3,98	3,96	4,00
Transaksi Rahasia	3,98	3,98	4,00
Transparansi Aduan	3,84	3,84	3,98
Respon Terhadap Aduan	3,89	3,91	4,00
NILAI IPAK	3,95	3,92	3,98

Evaluasi terhadap hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi terhadap pelayanan BDK Surabaya dapat dilakukan dengan mengurutkan dan membandingkan nilai IPAK terkecil untuk setiap unsur. Dari sepuluh unsur penyusun indeks persepsi anti korupsi, Balai Diklat Keagamaan Surabaya memiliki tiga unsur yang nilainya di bawah IPAK. Unsur tersebut adalah transparansi biaya, transparansi aduan, dan respon terhadap aduan. Ketiga unsur inilah yang seluruhnya memiliki nilai di bawah IPAK total. Unsur-unsur tersebut perlu mendapatkan prioritas perbaikan sebagai upaya peningkatan kepercayaan publik terhadap BDK Surabaya yang bersih melayani.



Gambar 3.15. Indeks Persepsi Anti Korupsi Per Unsur Penilaian

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Gambaran dan analisis hasil capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi yang disajikan dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi cerminan persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya, sehingga rencana perbaikan yang akan dirumuskan benar-benar mencapai sasaran yang diinginkan masyarakat pengguna pelayanan publik (peserta pelatihan).

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Indeks Persepsi Anti Korupsi Balai Diklat Keagamaan Surabaya pada triwulan pertama tahun 2025 mencapai nilai **3,94** dari skala 4. Hal ini berarti bahwa masyarakat percaya bahwa layanan yang diberikan oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya bersih dari korupsi.
2. Kepercayaan masyarakat bahwa Balai Diklat Keagamaan Surabaya bersih dari penyalahgunaan jabatan dan manipulasi peraturan mencapai 3,99 dari skala 4 dan merupakan nilai tertinggi dibandingkan unsur lainnya.
3. Unsur “transparansi biaya” merupakan unsur dengan nilai persepsi paling rendah dibandingkan unsur lainnya. Meski begitu, secara umum kinerja untuk unsur ini masuk dalam kategori “bersih dari korupsi”.

4.2. REKOMENDASI

Beberapa hal yang mungkin dapat diperhatikan agar kepercayaan masyarakat meningkat terhadap layanan BDK Surabaya antara lain:

1. Panitia kegiatan memberikan penjelasan mengenai rincian honorarium peserta pada saat pengarahan program pelatihan serta memberikan cetak fisik rincian honorarium peserta sebagai upaya transparansi biaya.
2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi SP4N – LAPOR! dalam upaya penghimpunan aduan masyarakat terkait korupsi. Penghimpunan aduan kemudian dilaporkan pada masyarakat melalui infografis yang dipublikasikan di media sosial, beserta tindak lanjutnya.
3. Mengoptimalkan keberadaan lemari anti gratifikasi untuk menanggapi hadiah-hadiah yang diberikan oleh peserta pelatihan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSzXyJNjR8d3N8iVlo35FL1gjdROKQxWU9sxvrYpj4ac3w/viewform

Photopea | Online P... Google Sheets Tuto... Adobe Acrobat Membuat database... Pohon Kinerja Kota All Bookmarks

Kementerian Agama RI
Balai Diklat Keagamaan Surabaya

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI BALAI DIKLAT KEAGAMAAN SURABAYA TAHUN 2025

Bapak/Ibu yang terhormat,
Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025, dan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permen PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah; Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Keagamaan Surabaya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan menjadi lembaga yang bersih dari korupsi.

Oleh karena itu, kami mengadakan survei secara online. Tujuan survei ini adalah untuk melihat persepsi peserta pelatihan terkait dengan usaha pencegahan dan penanganan korupsi di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Melalui Survei Persepsi Korupsi Balai Diklat Keagamaan Surabaya Tahun 2025, kami berharap mampu memetakan potensi korupsi untuk mendorong peningkatan kualitas layanan publik serta membangun etos kerja lembaga yang bersih dan bebas dari korupsi.

Jenis Kelamin *

Laki-laki
 Perempuan

Usia *

Jawaban Anda

Pendidikan Terakhir *

SMA/MA
 D3
 S1
 S2
 S3

Pangkat/Golongan *

Pilih

No. HP

Jawaban Anda

Instansi *

Contoh: Kankemenag Kab. Pacitan

Jawaban Anda

Unit Tugas *

Jawaban Anda

<p>Pelatihan yang Diiikuti pada Tahun 2025 *</p> <p>Pilih</p>	<p>Pernahkah Anda dihubungi oleh pegawai BDK Surabaya yang akan membantu dalam pengurusan berkas tertentu? (Menjual Pengaruh) *</p> <p>1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada</p> <p>1 2 3 4</p> <p><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/></p>
<p>Apakah pemberian layanan di BDK Surabaya dipersulit untuk maksud tertentu? (Manipulasi Peraturan)</p> <p>1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada</p> <p>1 2 3 4</p> <p><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/></p>	<p>Apakah Anda memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima, meskipun tidak diminta? (Hadiah)</p> <p>1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada</p> <p>1 2 3 4</p> <p><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/></p>
<p>Apakah layanan pada BDK Surabaya diberikan dengan permintaan imbalan tertentu oleh petugas? (Penyalahgunaan Jabatan)</p> <p>1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada</p> <p>1 2 3 4</p> <p><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/></p>	<p>Apakah Anda pernah mengurus berkas tertentu melalui pegawai BDK Surabaya di luar kantor? (Transaksi Rahasia)</p> <p>1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada</p> <p>1 2 3 4</p> <p><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/></p>
<p>Apakah Anda menandatangani bukti transaksi berupa SPJ atas hak-hak yang diterima? (Transparansi)</p> <p>1. Tidak Ada 2. Jarang 3. Sering 4. Selalu</p> <p>1 2 3 4</p> <p><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/></p>	<p>Apakah BDK Surabaya tidak terbuka terhadap pengaduan/laporan masyarakat terkait korupsi?</p> <p>1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada</p> <p>1 2 3 4</p> <p><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/></p>
<p>Apakah Anda pernah mengetahui ada praktik pencaloan dalam proses layanan di BDK Surabaya? (Pencaloan)</p> <p>1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada</p> <p>1 2 3 4</p> <p><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/></p>	<p>Apakah BDK Surabaya merespon lambat pengaduan/laporan masyarakat terkait korupsi?</p> <p>1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada</p> <p>1 2 3 4</p> <p><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/></p>
<p>Apakah Anda pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktik KKN di BDK Surabaya? (Perbuatan Curang)</p> <p>1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada</p> <p>1 2 3 4</p> <p><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/></p>	

Lampiran 2. Rekap Respon

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled "2025 - TR.1 - Excel". The ribbon at the top includes tabs for File, Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, View, Developer, Help, Acrobat, Power Pivot, and Tell me what you want to do. The Home tab is selected. The main content is a pivot table with the following structure:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
	JK	Usia	Kel. Usia	Pendidik.	Pangkat/Golongan	Pelatihan yang Dilukut pada Tahun 202	Instansi	Rumput	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	
1	Perempuan	35	30 - 39 tahun	S1	Non ASN	Pelatihan Manajemen Kemasjidan	Kankemenag Kab. Magetan	keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	Laki-laki	26	< 30 tahun	SMA/MA	Non ASN	Pelatihan Manajemen Kemasjidan	Kankemenag Kab. Magetan	keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	Laki-laki	36	30 - 39 tahun	S1	Non ASN	Pelatihan Manajemen Kemasjidan	Kankemenag Kab. Magetan	keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	Perempuan	42	40-49 tahun	S1	Non ASN	Pelatihan Manajemen Kemasjidan	Kankemenag Kab. Magetan	keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	Laki-laki	41	40-49 tahun	S1	Non ASN	Pelatihan Manajemen Kemasjidan	Kankemenag kab. Magetan	keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	Laki-laki	36	30 - 39 tahun	S1	Non ASN	Pelatihan Manajemen Kemasjidan	Kankemenag kab. Magetan	keagamaan	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	Laki-laki	40	40-49 tahun	S1	Non ASN	Pelatihan Manajemen Kemasjidan	Kankemenag magetan	keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	Laki-laki	44	40-49 tahun	S1	Non ASN	Pelatihan Manajemen Kemasjidan	Kankemenag Magetan	keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	Laki-laki	38	30 - 39 tahun	S1	Non ASN	Pelatihan Manajemen Kemasjidan	Kankemenag Kab. Magetan	keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	Laki-laki	45	40-49 tahun	S1	Non ASN	Pelatihan Manajemen Kemasjidan	Kankemenag Kab. Magetan	keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	Laki-laki	49	40-49 tahun	SMA/MA	Non ASN	Pelatihan Manajemen Kemasjidan	Kankemenag kab. Magetan	keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	Laki-laki	29	< 30 tahun	S1	Non ASN	Pelatihan Manajemen Kemasjidan	Kankemenag Kab. Magetan	keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	Perempuan	39	30 - 39 tahun	S1	Non ASN	Pelatihan Manajemen Kemasjidan	Kankemenag Kab. Magetan	keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	Laki-laki	27	< 30 tahun	SMA/MA	Non ASN	Pelatihan Manajemen Kemasjidan	Kankemenag Kab. Magetan	keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	Laki-laki	48	40-49 tahun	S1	Non ASN	Pelatihan Manajemen Kemasjidan	Kankemenag Kab. Magetan	keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	Laki-laki	40	40-49 tahun	S1	Non ASN	Pelatihan Manajemen Kemasjidan	Kankemenag Kab. Magetan	keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	Laki-laki	34	30 - 39 tahun	S1	Non ASN	Pelatihan Manajemen Kemasjidan	Kankemenag Kab. Magetan	keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	Laki-laki	28	< 30 tahun	S1	Non ASN	Pelatihan Manajemen Kemasjidan	Kankemenag Kab. Magetan	keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	Laki-laki	53	> 49 tahun	S1	Non ASN	Pelatihan Manajemen Kemasjidan	Kemenag Kab. Magetan	keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	Perempuan	35	30 - 39 tahun	S1	Non ASN	Pelatihan Manajemen Kemasjidan	Kemenag Kab. Magetan	keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	Laki-laki	43	40-49 tahun	S1	Non ASN	Pelatihan Manajemen Kemasjidan	Kankemenag Kab. Magetan	keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	Laki-laki	32	30 - 39 tahun	SMA/MA	Non ASN	Pelatihan Manajemen Kemasjidan	Kankemenag Kab. Magetan	keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	Laki-laki	39	30 - 39 tahun	S1	Non ASN	Pelatihan Manajemen Kemasjidan	Kankemenag Kab. Magetan	keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	Laki-laki	48	40-49 tahun	S1	Non ASN	Pelatihan Manajemen Kemasjidan	Kankemenag Kab. Magetan	keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	Laki-laki	46	40-49 tahun	S1	Non ASN	Pelatihan Manajemen Kemasjidan	Kankemenag Kab. Magetan	keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	Laki-laki	46	40-49 tahun	S1	Non ASN	Pelatihan Manajemen Kemasjidan	KANKEMENAG KAB. MAGETA	keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4